

**PANDANGAN M. NATSIR TENTANG DEMOKRASI:
Kajian Pemikiran Politik Islam**

Indah Muliati

Dosen UPT-MKU Universitas Negeri Padang
indah_2006@yahoo.com

ABSTRACT

This article discusses M. Natsir view on the concept of democracy in Islam. In the map of Islamic political thought, there are differing views on the concept of democracy from the West. No group has refused flatly to the correlation of Islam with the democracy, but there are also groups that accept the correlation of Islam with the concept of Western democracy. As one of the leaders of political Islam in Indonesia M. Natsir did not totally reject Western democracy. M. Natsir offers a slightly different concept of democracy known as Theistic Democracy. M. Natsir view of theistic democracy try to reconcile the theory of popular sovereignty with the sovereignty of God. M. Natsir rejected the system of theocracy and the secularization, but accepted the idea of nationalism. Additionally democracy in view M. Natsir have to walk on the following principles: monotheism, fraternity, equality, and ijtihad.

Kata Kunci: *Democracy, Islamic Democracy, Western Democracy*

ABSTRACT

Artikel ini membahas tentang pandangan M. Natsir tentang konsep demokrasi menurut Islam. Dalam peta pemikiran politik Islam, terdapat perbedaan pandangan terhadap konsep demokrasi yang berasal dari Barat. Ada kelompok yang menolak dengan tegas terhadap adanya korelasi Islam dengan demokrasi, namun ada pula kelompok yang menerima terhadap adanya korelasi Islam dengan konsep demokrasi dari Barat. Sebagai salah seorang tokoh politik Islam di Indonesia M. Natsir tidak sepenuhnya menolak demokrasi Barat. M. Natsir menawarkan sebuah konsep demokrasi yang sedikit berbeda yang dikenal dengan *Theistik Demokrasi*. *Theistik demokrasi* dalam pandangan M.Natsir mencoba mempertemukan teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan. Natsir menolak sistem theokrasi dan sekularisasi, namun menerima gagasan nasionalisme. Selain itu demokrasi dalam pandangan M.Natsir harus berjalan di atas prinsip-prinsip: *tauhid*, persaudaraan, persamaan, dan *ijtihad*.

Kata Kunci: *Demokrasi, Demokrasi Islam, Demokrasi Barat*

A. Pendahuluan

Dalam peta pemikiran politik Islam, terdapat perbedaan pandangan terhadap konsep demokrasi yang berasal dari Barat. Ada kelompok yang menolak dengan tegas terhadap adanya korelasi Islam dengan demokrasi, namun ada pula kelompok yang menerima terhadap adanya korelasi Islam dengan konsep demokrasi dari Barat.

Kelompok pertama yang dengan tegas menolak berpendapat bahwa demokrasi tidak memiliki nilai historis dan dukungan sama sekali dalam Islam, sebab sebagai sebuah sistem hukum dan moral, *syari'ah Islam* sudah lengkap. Dalam Islam kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan bukan di tangan rakyat. Sedangkan bagi kelompok yang menerima adanya korelasi Islam dengan konsep demokrasi berpendapat bahwa demokrasi Barat mirip dengan Islam dan memiliki persamaan-persamaan yang signifikan.

Beranjak dari dua pemikiran di atas, penulis melihat para pakar politik Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap konsep demokrasi. Salah satu tokoh modernis Indonesia, M. Natsir, memiliki pemahaman tersendiri terhadap konsep demokrasi. Makalah sederhana ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pandangan M. Natsir tentang konsep demokrasi.

B. Pendidikan dan Aktivitas Politik M. Natsir

M. Natsir adalah seorang cendekiawan, penulis, dan politikus Indonesia. Ia lahir tanggal 17 juli 1908 di daerah Jembatan Berukir,

Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat¹. M. Natsir mulai mengikuti pendidikan formal di saat ia berusia 8 tahun. Pada mulanya ia berkeinginan untuk mengikuti pendidikan di HIS (Hollandse Inlandse School), yaitu sekolah negeri orang Belanda. Namun keinginan untuk masuk sekolah itu gagal ketika M. Natsir diketahui anak seorang pegawai rendahan. Semangatnya yang tinggi untuk sekolah membuat orang tuanya menyekolahkan ke HIS adabiah Padang². Sebelum M. Natsir menyelesaikan pendidikannya di HIS Adabiah, M. Natsir dipindahkan oleh orang tuanya ke HIS pemerintah Solok. Di Solok M. Natsir mengikuti berbagai pendidikan keagamaan, seperti belajar Bahasa Arab dan al Qur'an kepada tuanku Mudo Amin di Madrasah Diniyah³.

Kemampuannya dalam berbahasa Arab, serta pertemuannya dengan tokoh-tokoh pembaharuan seperti Abdullah Ahmad dan Tuanku Mudo Amin disertai kegemarannya membaca tulisan-tulisan pembaharuan, membuat Natsir terlibat intensif menggeluti ide dan pemikiran para pembaharu dalam usia yang relatif muda.

Pada tahun 1923 Natsir melanjutkan pendidikannya ke MULO (*Middlebare Uitgebreid Lager*

¹ Salam, Sholichin. 1990. *Wajah Nasional*. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam.

² Yunus, Mahmud. 1996. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.

³ Noer, Deliar. 1998. *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta : LP3S

Onderwyis) di kota Padang⁴. Disamping sibuk mengikuti pendidikan di Mulo, ia juga aktif dalam kegiatan kepanduan Natipij yang bernaung di bawah *Jong Islamiten Bond* (JIB) seperti organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) sekarang⁵. Ia menyelesaikan pendidikannya di MULO pada tahun 1927, kemudian ia merantau ke Bandung untuk mengikuti pendidikan lanjutan di AMS (*Algemene Middlebare School*), AMS merupakan jenjang pendidikan untuk persiapan mengikuti universitas di Belanda⁶. Di sekolah ini ia mulai menekuni ilmu pengetahuan Barat. Ia mempelajari berbagai aspek sejarah peradaban Islam, Romawi, Yunani, dan Eropa melalui buku-buku berbahasa Arab, Perancis dan Latin. Tanpa kesulitan Natsir dapat mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Bahkan dari sinilah Natsir memulai keseriusannya dalam merumuskan konsepsinya tentang Islam dan berbagai sejarah Islam melalui kacamata Barat (buku-buku barat).

Setelah setahun masuk AMS. Natsir kembali memasuki organisasi JIB, ia aktif dalam JIB sampai studinya di AMS selesai tahun 1930. Motivasi masuk JIB, karena ia prihatin terhadap besarnya pengaruh Barat di kalangan pelajar-pelajar muslim, yang terlihat dari cara

berpikir dan bergaul ala Barat, mereka bangga mengidentifikasi diri dengan orang Belanda⁷. Dengan aktifnya di JIB ia berusaha melakukan pendekatan dan menumbuhkan simpati di kalangan pelajar terhadap Islam dan organisasi JIB. Selama tinggal di Bandung Natsir juga belajar pada tokoh ulama Persis A. Hasan. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah hidup Natsir sebagai peristiwa yang menariknya ke dalam gerak perjuangan Persis. Dari Persis inilah Natsir mulai meniti kariernya sebagai seorang pejuang, negarawan, dan agamawan. Natsir terlibat dalam penerbitan majalah *Pembela Islam* sejak awal terbit (Oktober 1929).

Setelah menyelesaikan studi di AMS. Natsir tidak melanjutkan kuliahnya, ia menolak beasiswa yang ditawarkan untuknya. Malahan ia mengajar di salah satu MULO di Bandung. Kenyataan ini merupakan panggilan jiwanya untuk mengajar agama yang pada masa itu belum memadai. Natsir kemudian mendirikan Lembaga Pendidikan Islam (Pendis), suatu bentuk pendidikan modern yang mengkombinasikan kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan pesantren. Natsir menjabat sebagai Direktur Pendis selama sepuluh tahun sejak tahun 1932.

Terjadinya perubahan dalam pergerakan Islam yang pada awalnya terfokus pada pergumulan *fihiyyah* dan *furu'iyah* beranjak kepada pergumulan Islam yang ideologis dan politis. Natsir ikut terbawa ke dalam arus perubahan ini, ditandai dengan keterlibatan Natsir dalam aktivitas politik, ketika pertama kali mendaftarkan diri menjadi anggota

⁴ Nasution S. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁵ A. Puar, Yusuf. 1978. *70 Tahun M. Natsir: Kenang-kenangan Kehidupan Perjuangan*. Jakarta : Pustaka Antara.

⁶ Suhelmi, Ahmad. 1999. *Soekarno Versus Natsir Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah.

⁷ *Ibid*

partai Islam Indonesia (PII), dan pada tahun 1940 ia terpilih sebagai ketua umum cabang partai tersebut di Bandung. Disamping itu ia aktif pula dalam kepemimpinan *Majellis al-Islam A'la Indonesia* (MIAI)⁸.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) Natsir menjabat sebagai kepala Bagian Pendidikan Kotamadya Bandung. Dalam jabatannya sebagai Kepala Bagian Kotamadya, Natsir ikut mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, Natsir tampil menjadi salah seorang politikus dan pemimpin Negara. Pada awalnya ia menjadi anggota kerja komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), kemudian menjadi Menteri Penerangan tahun 1946-1948. Akhirnya karir politik Natsir mencapai puncaknya ketika ia dilantik menjadi Perdana Menteri Indonesia (1950-1951)⁹.

Pelantikannya sebagai Perdana Menteri adalah konsekuensi yang wajar mengingat kedudukannya sebagai ketua Partai Masyumi, partai politik terbesar di Indonesia pada saat itu. Oleh sebab itu keberadaan Natsir dalam Masyumi telah membawa nuansa baru bagi perjuangan umat Islam terhadap kepentingan agama, politik, ekonomi dan sosial. Natsir memimpin Masyumi sebagai ketua umum, sejak tahun 1949 sampai 1958, dua tahun sebelum dibubarkan. Sembilan tahun

Natsir memainkan perannya dalam Masyumi sebagai partai Islam terbesar dalam percaturan politik di Indonesia. Sebagai pemimpin politik Islam, Natsir secara maksimal telah memberikan seluruh tenaga dan pikirannya bagi kepentingan umat Islam Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia.

Disamping itu, tampilnya Natsir ke puncak pemerintahan, sebagai Perdana Menteri, juga tidak terlepas dari langkah strategisnya dalam mengemukakan Mosi pada sidang parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 3 April 1950, yang lebih dikenal dengan Mosi Integral M. Natsir. Mosi itulah yang memungkinkan RI yang telah terpecah belah menjadi tujuh belas Negara bagian, kembali menjadi Negara kesatuan RI. Sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari mosi integral Natsir, dan oleh beberapa politisi dianggap sebagai proklamasi kedua setelah 17 agustus 1945. Hal ini tidaklah mudah bagi Natsir sebab sebagai ketua Umum Masyumi, ia harus berulang kali mengadakan pendekatan terhadap berbagai partai dan kekuatan golongan saat itu. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Natsir semuanya bertujuan untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan kehidupan perekonomian yang stabil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

Aktivitas politik Natsir, yang tidak dapat dilupakan adalah perdebatan-perdebatan yang dilakukannya dalam sidang Konstituante tahun 1956-1959. Perdebatan-perdebatan tersebut berhubungan dengan upaya Natsir untuk men-

⁸ Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1985. *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP2ES.

⁹ Mahfud M. D, Moh. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Kenegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.

jadikan Islam sebagai dasar Negara dan sekaligus menolak berbagai berbagai ideologi lain, seperti Nasionalis, Sosialis, dan Pancasila untuk dijadikan sebagai dasar Negara.

Ide-ide yang dilontarkan Natsir dalam berbagai rapat Konstituante, semakin mempertegas keterlibatannya dalam usaha membangun sebuah sistem politik yang demokratis berdasarkan kepada Syari'ah. Walaupun tidak dapat dielakkan, bahwa dengan kegagalan Konstituante yang kemudian melahirkan kekuasaan terpimpin di bawah Presiden Soekarno, berakibat kepada dibubar-kannya partai politik islam Masyumi pada tahun 1960.

Karir Natsir sebagai politikus mengalami pasang surut. Oposisinya terhadap presiden Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin (1950-1959), dan sikap anti komunisnya yang keras, mendorongnya untuk bergabung dengan kaum pembangkang, yang pada mulanya digerakkan oleh panglima-panglima militer di daerah. Oposisi ini akhirnya merebak menjadi pergolakan bersenjata, setelah mereka membentuk PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Barat. Namun akhirnya PRRI dilumpuhkan secara militer oleh pemerintah pusat. Setelah menerima amnesti dari keterlibatannya di dalam PRRI, Natsir ternyata ditahan oleh pemerintah Soekarno dengan dakwaan subversif. Selama tujuh tahun, ia berada dalam tahanan tanpa proses peradilan. Natsir baru dibebaskan oleh Pemerintah Orde Baru, beberapa waktu setelah Pemerintahan Presiden Soekarno jatuh.

Tatkala pemerintahan orde baru muncul pada tahun 1967, Natsir pun tidak mendapat tempat dan kedudukan dalam pemerintahan. Natsir mengalihkan strategi perjuangannya kepada kegiatan dakwah. Strategi inilah yang kemudian melahirkan DDII pada tanggal 26 Februari 1967. Keberanian Natsir mengoreksi Pemerintah Orde Baru dengan ikut menandatangani Petisi 50, tanggal 5 Mei 1980, menyebabkan ia dicekal ke luar negeri tanpa melewati proses pengadilan. Sikap politik Natsir yang paling akhir menjelang akhir hayatnya, adalah dukungannya terhadap Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilu 1992. Disamping itu karena dukungan dan gagasan-gagasannya M. Natsir mendapat berbagai penghargaan internasional di antaranya: sejak tahun 1967 ia dilantik menjadi wakil presiden *World Congress* yang bermarkas di Pakistan dan anggota Badan Pendiri *Rabithah al-A'lam al-Islami* yang berpusat di Saudi Arabia¹⁰. Tahun 1980 ia menerima bintang penghargaan dari pemerintah Tunisia dan Yayasan Raja Faisal Arab Saudi atas pengabdianya terhadap dunia Islam. Di dunia akademik ia menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Lebanon (1967) dalam bidang sastra. Sedangkan dalam bidang pemikiran Islam diterimanya dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Teknologi Malaysia (1991)¹¹.

¹⁰Ihza Mahendra, Yusril. 1994. "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Muhammad Natsir". *Islamika*, No.3 Januari-Maret.

¹¹ Salam, Sholichin. 1990. *Op cit*.

Natsir wafat pada tanggal 6 Februari 1993 di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dalam usia 85 tahun¹². Natsir selain terjun dalam kancah politik dan pendidikan ia juga aktif memberikan sumbangan pemikirannya melalui karya tulis dalam bentuk buku serta artikel-artikel yang dimuat di majalah dan tabloid terkemuka. Di antara karya-karya beliau tersebut antara lain ; *Islam Sebagai Ideologi, Some Observation Concerning the Rule of Islam in National and International Affairs, Islam dan Akal Merdeka, Islam dan Kristen di Indonesia, The Rule of Islam in the Promotion of National Resilience, Asas Keyakinan Agama kami, Mempersatukan Umat Islam, Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah, Di bawah Naungan Risalah, Bahaya takut, Dunia Islam dari Masa ke Masa, Tauhid Untuk Persaudaraan Islam Universal, World of Islam Festival dalam Perspektif Sejarah, Iman Sebagai Sumber Kekuatan Lahir dan Batin, Fiqhud Dakwah, Dakwah dan Pembangunan, Kapita Selekta I dan II, Demokrasi di bawah Hukum, Indonesia di Persimpangan Jalan, Islam Sebagai Dasar Negara*¹³, dan masih banyak yang lainnya. Dari sekian banyak tulisannya, tidak terlepas dari semangat amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengingatkan, memotivasi dan membimbing manusia pada umumnya serta umat Islam khususnya.

¹²Luth, Thohir. 1999. *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Pers.

¹³Natsir, M. 2000. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Dewan Dakwah

C. Pandangan M. Natsir tentang Demokrasi

Konsep Demokrasi

Menurut M. Natsir Demokrasi adalah prinsip pemerintahan yang sesuai dengan Islam dan realitas masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena demokrasi mengandung paham kedaulatan rakyat¹⁴. Kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat sebagai amanah Tuhan kepada mereka. Namun menurut Natsir pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma syari'ah dan tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan.

Berangkat dari asumsi ini, Natsir menawarkan konsep demokrasi Islam dengan menggunakan istilah *Theistic democracy*¹⁵. Penggunaan istilah *Theistic democracy* M. Natsir dilatarbelakangi oleh dua pandangan; *pertama*, Islam tidak mengenal konsep demokrasi yang berkembang di Barat, dalam arti semua keputusan politik diserahkan sepenuhnya kepada kehendak mayoritas anggota parlemen, sedangkan dalam Islam, tidak semua persoalan yang harus dibicarakan di dalam parlemen. Persoalan yang akan diputuskan hanya yang berkaitan dengan persoalan yang tidak ditemukan secara tegas keputusannya dalam nash. *Kedua*, Islam tidak mengenal sistem teokrasi, di mana suatu pemerintahan dikuasai oleh satu *priesthood* (sistem kependetaan), yang mempunyai *hierarchi* (tingkat bertingkat) serta menganggap penguasa itu sebagai

¹⁴ Ihza Mahendra, Yusril. 1994. *Op cit*.

¹⁵ Natsir, M. 2000. *Op cit*.

wakil Tuhan di bumi. Oleh sebab itu dalam ungkapan yang tegas, Natsir menyatakan bahwa demokrasi Islam itu adalah suatu pengertian dan suatu paham yang mempunyai sifat-sifat tersendiri. Islam bukan demokrasi 100%, bukan pula teokrasi 100%. Islam itu, ya Islam¹⁶.

M. Natsir termasuk kepada kelompok yang menerima ide demokrasi yang berasal dari Barat, akan tetapi, ia tidak menerima sepenuhnya konsep demokrasi Barat, namun mewarnai konsep tersebut dengan nilai-nilai Syari'ah. Menurut Natsir, di dalam Islam juga terdapat prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana dalam demokrasi Barat. Di lain pihak ia mengakui adanya perbedaan antara demokrasi Islam dengan demokrasi Barat, terutama tentang kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi Barat kekuasaan rakyat merupakan sesuatu yang mutlak dan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat (majelis yang dipilih) berwenang sepenuhnya membuat undang-undang. Segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh majlis menjadi suatu ketentuan yang mesti dijalankan, meskipun itu bertentangan dengan norma-norma susila, atau bahkan bertentangan dengan kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Tetapi dalam Islam, kekuasaan rakyat tidaklah bersifat mutlak seperti dalam demokrasi Barat, melainkan terikat dengan ketentuan-ketentuan syari'ah yang dipeluk oleh umat Islam. Oleh karena itulah Natsir menawarkan konsep demokrasi Islam, yaitu dengan mempertemukan teori

kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan, yang disebut dengan sistem "*Theistik Democracy*".

Natsir menolak sistem Theokrasi dan sekularisasi, namun ia menerima gagasan nasionalisme, karena menurutnya Islam sendiri mengakui eksistensi bangsa-bangsa, di balik itu ia mengecam nasionalisme yang sempit dan berlebihan seperti nasionalisme yang mengarah kepada fanatik kesukuan.

Tujuan Demokrasi

Menurut Natsir yang menjadi tujuan negara sekaligus menjadi tujuan demokrasi adalah kesempurnaan berlakunya ajaran Ilahi. Ini terlihat dalam ungkapan Natsir :

... Negara bagi kita bukanlah tujuan, tetapi alat, urusan bernegara pada pokoknya dan pada dasarnya suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan, yang menjadi tujuan ialah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berhubungan dengan perikehidupan yang fana ini ataupun yang berkenaan dengan kehidupan kelak di alam baka¹⁷.

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi tujuan demokrasi sama dengan tujuan negara. Sebab, negara yang dikehendaki Natsir adalah negara demokrasi. Dengan demikian, sistem demokrasi menurut Natsir, disamping mengarahkan prosedural politiknya ke dalam mekanisme hukum dan kedaulatan rakyat, demokrasi juga bertujuan agar pemerintah dapat melahirkan

¹⁶M. Natsir. 1973. *Capita Selecta I*. Jakarta: Bulan Bintang.

¹⁷ *Ibid*

berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat.

Tujuan demokrasi yang menye-
laraskan antara kehidupan dunia dan
akhirat, tidak selalu berarti meng-
gunakan jalur negara agama atau
teokrasi. Dengan sifat realistis yang
dimiliki oleh demokrasi, yang
ditunjukkan dengan kemampuannya
mengolaborasi hak-hak rakyat, maka
tempat yang paling tepat bagi
persemaian demokrasi adalah bentuk
negara *republik* (pemerintahan
rakyat). Sebagaimana yang dijelas-
kan Natsir sebelumnya, bahwa
negara yang berdasarkan Islam
bukanlah teokrasi, ia bukan sekuler
melainkan sebuah negara yang
disebut dengan *teistik demokrasi*¹⁸.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Melihat betapa pentingnya persoalan
demokrasi dalam membangun sistem
politik, terutama dalam mereali-
sasikan aturan-aturan *syari'ah*, maka
bagi Natsir, demokrasi harus
memiliki empat prinsip dasar, yaitu,
tauhid, persaudaraan, persamaan dan
ijtihad¹⁹.

1) *Tauhid*.

Natsir mengibaratkan tauhid sebagai
sebilah pisau bermata dua. Pada satu
sisi, ia menegaskan keesaan Allah
sebagai satu-satunya zat yang
dipertuhan (*al-Ilah*) oleh manusia,
dan menjadi titik tolak dari seorang
muslim dalam memandang hidup-

nya. Sedangkan disisi kedua dari
tauhid itu adalah rasa kesatuan
universal umat manusia sebagai umat
yang satu, berdasarkan persamaan,
keadilan, kasih sayang, toleransi dan
kesabaran. Dengan menetapkan
tauhid sebagai poros sentral kehi-
dupan, umat Islam dapat menarik
atau mendeduksi nilai-nilai etik,
moral dan norma-norma pokok
ajaran Islam sebagai patokan dasar
bagi kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Dengan demikian,
berangkat dari konsep tauhid, Natsir
menyatakan bahwa perjuangan
politik umat Islam untuk mem-
bangun suatu masyarakat yang lebih
baik, hanya akan terlaksana melalui
demokrasi.

2) *Persaudaraan*

Dengan menjunjung tinggi persau-
daraan akan melahirkan sikap adil
terhadap sesama manusia. Keadilan
merupakan nilai-nilai kemanusiaan
yang asasi dan menjadi pilar dalam
berbagai aspek kehidupan, baik
individu, keluarga maupun masya-
rakat. Negara menurut Natsir harus
dibangun atas dasar keadilan.
Menurut Natsir, keadilan yang
dibawa oleh Islam, baik dibidang
hukum, sosial maupun ekonomi
adalah keadilan yang menempatkan
manusia sebagai makhluk yang
berdaulat dan bermartabat.

3) *Persamaan*

Persamaan mengandung pengertian
tidak membeda-bedakan siapapun
dalam mentaati undang-undang,
tidak ada yang lebih tinggi dari yang
lain. Sehingga, antara penguasa dan
rakyat mempunyai kedudukan yang
sama, tidak ada keistimewaan di

¹⁸M. Natsir. 2001. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Dakwah.

¹⁹ M. Natsir. *Demokrasi di Bawah Hukum*. 1987. Jakarta: Media Dakwah.

depan hukum. Persamaan merupakan suatu prinsip yang tidak memandang seseorang berdasarkan pertimbangan ras, suku, silsilah maupun fanatisme.

4) *Ijtihad*.

Menurut Natsir, perumusan kebijaksanaan politik, hukum maupun ekonomi tersebut haruslah mengacu kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin. Namun apabila petunjuk dalam mengambil keputusan itu tidak ditemukan dalam *nash* (al-quran dan hadits), maka keputusan diambil berdasarkan *ijtihad*, *syura* dan *ijma*. Bagi Natsir, *ijtihad* merupakan suatu keharusan mutlak dalam menghadapi Islam dengan dinamika perubahan masyarakat²⁰.

Menurut Natsir, konsep *ijtihad* dan *ijma*, jika dihubungkan dengan konsep *syura* yang disebutkan dalam al-Qur'an, dapat diwujudkan ke dalam bentuk sebuah parlemen yang anggota-anggotanya dipilih oleh seluruh rakyat. Mereka yang menerima amanah dari seluruh rakyat itu, dengan berpedoman kepada asas-asas doktrin, dapat membuat berbagai kebijakan berdasarkan keputusan mayoritas.

Hubungan Agama dan Negara Demokrasi

Natsir menolak pendapat tentang pemisahan agama dan negara. Menurutnya agama dan negara harus menyatu, tidak ada pemisahan antara keduanya. Keluarnya pernyataan ini merupakan reaksi kerasnya terhadap pandangan yang dikemukakan oleh

Soekarno yang mendukung ide sekularisasi yang dilakukan oleh Kemal al-Taturk di Turki. Soekarno berpendapat bahwa terjadinya pemisahan antara agama dan negara akan membuat keduanya (agama maupun negara) dapat berkembang dengan baik. Menurut Natsir, Islam mempunyai konsep tentang cara mengatur negara, meskipun kerangka dasar saja. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Islam tidak memisahkan antara agama dan negara.

Melihat eratnya hubungan dasar negara dengan sosio-religius masyarakat, maka menurutnya tidak ada ketentuan baku mengenai bentuk pemerintahan. Untuk itu beliau berpendapat umat Islam boleh mencontoh sistem-sistem pemerintahan yang ada di negara-negara lain, jika sistem tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki Islam.

Menurut M. Natsir negara yang mampu menghadirkan kepentingan masyarakat adalah negara demokrasi. Menurutnya pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang dapat menjamin hak-hak rakyat dalam batas-batas yang dibolehkan oleh syari'ah Islam. Demokrasi yang berdasarkan hukum Islam inilah yang disebut Natsir dengan Demokrasi Islam, yang kemudian dipertegasnya dengan istilah *Theistik Democracy*.

Natsir juga menolak Pancasila sebagai dasar negara RI, menurutnya Pancasila tidak patut dijadikan ideologi negara, karena sila-sila itu semuanya relatif, baik sila-sila itu sendiri maupun hubungan satu

²⁰ Ihza Mahendra, Yusril. 1994. *Op cit*.

dengan lainnya. Berbeda dengan Pancasila, Islam mempunyai hukum-hukum yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan melalui wahyu, yang memberikan ukuran mutlak untuk mengatur persoalan-persoalan manusia. Penolakan Natsir terhadap Pancasila sebagai dasar negara, bukan dilandasi oleh pertentangan ajaran Islam. Tetapi disebabkan netralisir nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut telah ditafsirkan secara sekuler oleh para pihak pendukungnya.

D. Penutup

M. Natsir merupakan salah seorang tokoh politik Islam di Indonesia yang menegaskan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan Negara. Islam memiliki konsep tentang cara mengatur Negara meskipun kerangka dasar. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk sosial ekonomi, politik dan kebudayaan.

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintah yang berasal dari barat. Namun M. Natsir sebagai salah seorang tokoh politik Islam di Indonesia tidak sepenuhnya menolak

demokrasi. M. Natsir menawarkan sebuah konsep demokrasi yang sedikit berbeda yang dikenal dengan *Theistik Demokrasi*. *Theistik demokrasi* dalam pandangan M.Natsir mencoba mempertemukan teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan. Natsir menolak sistem theokrasi dan sekulerisasi, namun menerima gagasan nasionalisme.

Menurut Natsir demokrasi bertujuan mengarahkan procedural politiknya ke dalam mekanisme hukum dan kedaulatan rakyat, selain itu menurutnya demokrasi juga bertujuan agar pemerintah dapat melahirkan berlakunya undang-undang Ilahi (Tuhan), baik yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai individu maupun manusia sebagai anggota masyarakat. Selain itu demokrasi dalam pandangan M. Natsir harus berjalan di atas prinsip-prinsip: *tauhid*, persaudaraan, persamaan, dan *ijtihad*. Jika tidak berjalan di atas prinsip-prinsip tadi, maka tujuan dari demokrasi tidak akan tercapai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Puar, Yusuf. 1978. *70 Tahun M. Natsir: Kenang-kenangan Kehidupan Perjuangan*. Jakarta : Pustaka Antara.
- Ihza Mahendra, Yusril. 1994. "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Muhammad Natsir". *Islamika*, No.3 Januari-Maret.
- Luth, Thohir. 1999. *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1985. *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP2ES.

- Mahfud M. D, Moh. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Kenegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution S. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Natsir, M. 2000. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Dewan Dakwah
- , 1973. *Capita Selecta I*. Jakarta: Bulan Bintang
- , 2001. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- , *Demokrasi di Bawah Hukum*. 1987. Jakarta: Media Dakwah.
- Noer, Deliar. 1998. *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta : LP3S
- Salam, Sholichin. 1990. *Wajah Nasional*. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam.
- Suhelmi, Ahmad. 1999. *Soekarno Versus Natsir Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah.
- Yunus, Mahmud. 1996. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.